

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Sidkun 3 in 1

implementasi program SIDUKUN 3 in 1 telah dijalankan dalam berbagai kondisi yang terus berubah seiring dengan perubahan iklim pelayanan publik yang selalu menuntut untuk agar selalu menjadi pelayanan yang berkualitas dengan segala kendala yang dihadapi dengan upaya yang maksimal.

implementasi program SIDUKUN 3 in 1 dalam meningkat kualitas pelayanan publik pada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari perspektif Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Teori implementasi kebijakan model George C. Edward III.

Secara umum, program SIDUKUN 3 in 1 ini telah diimplementasikan dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang masih harus dibenahi terutama kendala teknis berupa jaringan yang sering error dan kendala kebijakan terkait wewenang untuk pemberian Hak akses SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

2. Standar Pelayanan Program SIDUKUN 3 in 1

Bila ditinjau dari segi kualitas pelayanan publik yang telah memenuhi kriteria Standar Pelayanan, maka kualitas pelayanan publik pada Program SIDUKUN 3 in 1 dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

a. Prosedur layanan

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

kesederhanaan dan atau kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan publik. Hasil temuan dilapangan membuktikan bila dibandingkan dengan mengurus akta kelahiran secara konvensional, prosedur pelayanan program Si Dukun 3 In 1 mudah dan tidak berbelit-belit, dan tidak membutuhkan waktu yang lama

b. Waktu Pelayanan

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan waktu penyelesaian adalah waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. Berdasarkan penelitian Program SIDUKUN 3 in 1 telah mampu menyelesaikan dokumen dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

c. Biaya Pelayanan

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan yang berkaitan dengan pengenaan biaya secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar peraturan yang ada.

Pembuatan akta kelahiran melalui program SI Dukun 3 In 1 tidak dikenakan biaya sama sekali atau gratis karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

d. Produk Layanan

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bebas dari kesalahan teknis, baik dalam penelitian permohonan yang telah

diajukan sebelumnya maupun dalam hal teknis lainnya. Produk pelayanan yang ditawarkan oleh program Si Dukun 3 In 1 terdiri dari produk fisik dan non fisik. Produk fisik terdiri dari Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Baru, Kartu Identitas Anak, dan kartu BPJS Kesehatan, serta surat keterangan lahir dari rumah sakit tempat bayi dilahirkan. Produk non fisik terdiri dari nomor identitas kependudukan dan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan bayi yang baru dilahirkan.

produk layanan yang dihasilkan oleh program SIDUKUN 3 in 1 tidak semua diterima oleh masyarakat pengguna layanan ini sesuai dengan ketentuan, masih ada warga masyarakat yang tidak langsung menerima e-ID BPJS dikarenakan terkendala jaringan dan sebagainya.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan layanan program SIDUKUN 3 in 1 di RSUD disediakan oleh Dinas Dukcapil, seperti komputer, printer, dan blanko KIA namun dibutuhkan peremajaan, mengingat usia pakai sudah sejak pengadaan tahun 2011. Sedangkan pihak RSUD menyediakan ruangan dan jaringan internet.

f. Kompetensi petugas pemberi layanan

Petugas telah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan proses pembuatan akta kelahiran menggunakan program SI Dukun 3 in 1. Selain itu petugas operator juga memiliki sikap dan etika yang baik yang dapat mencerminkan pelayanan prima.

3. Outcome program SIDUKUN 3 in 1

Implementasi program SIDUKUN 3 in 1 selama ini sudah berjalan dengan baik namun dalam perjalanannya menghadapi banyak faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam mencapai yujun yang telah ditetapkan. Ada faktor yang sifatnya teknis dan ada juga faktor yang sifat non teknis yaitu kebijakan pemerintah pusat.

Faktor teknis dapat diselesaikan dengan upaya perbaikan dan koordinasi antar instansi yang berkolaborasi namun Faktor hambatan

utamanya justru datang dari faktor non teknis yaitu kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Adminduk Kemendagri.

Untuk menganalisa persoalan tersebut dengan secara mendalam, peneliti menggunakan pendekatan teori Implementasi kebijakan model George C. Edward III, yang mempertanyakan terkait dengan pra kondisi atau prasyarat pelaksanaan suatu kebijakan atau program dalam proses pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri yakni keberhasilan implementasi program SIDUKUN 3 in 1 dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, yaitu hal apa saja yang menjadi prasyarat berhasilnya program SIDUKUN 3 in 1 dan hal apa yang menjadi faktor penghambat utama terhadap keberhasilan program SIDUKUN 3 in 1 ini.

4. Faktor penyebab rendahnya tingkat capaian kepemilikan e-ID BPJS dalam program SIDUKUN 3 in 1

Bila dilihat dari perspektif implementasi kebijakan dimana suatu program kebijakan itu dapat dikatakan berhasil atau tidak adalah dengan melihat sejauh mana nilai kebermanfaatan atau outcomes dari implementasi program SIDUKUN 3 in 1 ini, paling tidak terkait outcomes yang diterima oleh instansi yang telah terintegrasi dengan program SIDUKUN 3 in 1 ini.

Menurut implementasi kebijakan model George C. Edward, agar dapat melihat hal hal apa saja yang menjadi prasyarat keberhasilan sekaligus untuk mengetahui faktor penghambat utama keberhasilan program SIDUKUN 3 in 1 ini dapat dianalisa menggunakan empat faktor, yaitu struktur birokrasi, disposisi, komunikasi dan sumberdaya.

a. Struktur birokrasi

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, terkait dengan struktur birokrasi, Pada Program SIDUKUN 3 in 1 ini sudah memiliki SOP yang berfungsi sebagai pengarah pelaksanaan kebijakan bagi para pelaksana dan adanya fragmentasi sangat dibutuhkan dalam Program

Sudukun 3 in 1 ini karena program ini tidak hanya dijalankan oleh satu instansi, melainkan beberapa instansi yang berkolaborasi. Hal ini dilakukan agar masing masing instansi yang terlibat dapat tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing masing sehingga mencegah terjadinya overlappaing atau tumpang tindih.

b. Disposisi

Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan terkait faktor disposisi, ternyata ditemukan sikap acuh tak acuh maupun sikap kurang komitmen para pelaksana kebijakan bukan hanya dibangun berdasarkan kesadaran dan pemahaman diri akan pentingnya manfaat suatu program kebijakan, namun juga dipengaruhi oleh kapabilitas dari pelaksana program, baik secara kualitas maupun kuantitas.

c. Komunikasi

1) Transmisi kebijakan di Disdukcapil nya sendiri relatif tidak ada masalah. Mengingat pelaksanaan kebijakan pada dasarnya hanya merubah sistem dan mempercepat pelayanan dengan mendekatkannya kepada masyarakat. Dan secara teknis pun penerbitan dokumen kependudukan memang sudah dilakukan dan menjadi tugas keseharian para operator Dukcapil.

2) Kejelasan, Program Si Dukun 3 In 1 saat ini telah lebih diperjelas dengan adanya Instruksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan Pelayanan Kelahiran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan (SI DUKUN 3 in 1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Pusat, Puskesmas, Dan Rumah Sakit Swasta. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan lebih memberikan arahan yang jelas terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing sektoral.

3) Konsisten, terkait informasi yang tetap dan tidak berubah ubah, yang merupakan hasil rapat dan kajian yang melahirkan Keputusan Kepala

Dinas sebagai SOP yang dijadikan sebagai pengarah kegiatan dilapangan sehingga konsisten dalam pencapaian tujuan program.

d. Sumber Daya:

Sumber daya yang akan dianalisa pada program ini adalah terkait dengan staf, informasi, fasilitas dan wewenang.

1) Staf, ada kekurangan staf pada beberapa service point layanan program SIDUKUN 3 in 1, salah satunya adalah RSUD Kecamatan Kalideres, yang cukup menjadi kendala dalam efisensi waktu penyelesaian dokumen.

2) Informasi, terkait dengan tata cara pelaksanaan dan data kepatuhan darp pelaksana, untuk pengumpulan informasi terkait dua hal tersebut diatas, Dinas Dukcapil telah membentuk Tim Monev yang berfungsi sebagai pengumpul data dan informasi seputar kegiatan pelaksanaan program dilapangan, yang mana informasi tersebut digu-

nakan sebagai bahan pengambilan keputusan bila sewaktu waktu diperlukan.

3) Fasilitas, berupa sarana dan prasarana seperti komputer, printer, blanko KIA sudah terpenuhi si semua service point namun kondisinya kurang memadai karena spesifikasinya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan fasilitas ini merupakan pengadaan tahun 2011.

4) Wewenang diperlukan dalam program SIDUKUN 3 in 1 ini:

a) Sebagai legalitas formal berupa Surat Penugasan kepada para pelaksana merupakan bentuk pendelegasian sebagian wewenang Dinas Dukcapil untuk kegiatan pengawasan, operasional dan maintenance.

b) Sebagai pengaturan pengaturan tugas pokok dan fungsi masing masing bagian atau instansi sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping.

c) Kewenangan berupa hak akses untuk melakukan bridging system antara SIAK (Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan) dengan aplikasi yang ada di RSUD maupun BPJS Kesehatan. Yang saat ini sudah tidak dapat dilakukan karena keterbatasan Hak akses yang hanya dapat diberikan oleh Dirjen Adminduk, sehingga Program SIDUKUN 3 in 1 sudah tidak dapat dijalankan sesuai dengan konsep awal, dimana ada outcomes berupa pemanfaatan NIK sebagai Key Access oleh BPJS Divre IV untuk penunggalan Data kepesertaan BPJS dan pemanfaatan NIK bayi baru lahir sebagai akses kunci untuk pengajuan e-ID BPJS.

Maka terjawablah sudah pertanyaan penelitian ini tentang Faktor penghambat utama sehingga program ini berjalan kurang baik, yaitu faktor Sumberdaya wewenang, terkait dengan wewenang dalam pemberian hak akses untuk integrasi dengan aplikasi SIAK. Tanpa hak akses dari Dirjen Adminduk, maka Integrasi database kependudukan tidak dapat dilaksanakan. sehingga outcomes berupa pemanfaatan NIK sebagai kunci akses oleh BPJS Divre IV tidak didapatkan, karena berhasilnya suatu program kebijakan itu salah satunya ditentukan oleh seberapa besar nilai kebermanfaatannya untuk kelompok sasaran maupun stakeholder yang berkolaborasi.

B. SARAN

1. Kualitas Pelayanan publik pada pelaksanaan program SIDUKUN 3 in 1 yang sudah baik ini agar dipertahankan
2. Peremajaan sarana dan prasarana pendukung sebaiknya segera dilakukan agar tidak menghambat proses layanan yang sedang berjalan
3. Terkait dengan Disposisi, adanya sikap acuh tak acuh dan kurang komitmen dari para pelaksana karena terkendala aplikasi, sebaiknya dinas Dukcapil memfasilitasi dengan pembuatan super apps yang dapat di akses dan sincronize dengan aplikasi yang ada di instansi lain, RSUD ataupun BPJS Divre IV, sebagai pengganti kebijakan terdahulu terkait Hak akses.

4. Adanya kekurangan staf operasional program SIDUKUN 3 in 1 pada RSUD kalideres sebaiknya menjadi perhatian juga, karena hal ini bisa mnejadi hambatan kedepannya.
5. Terkait dengan wewenang pemberian Hak akses SIAK, sebaiknya Dinas berkoordinasi dengan Dirjen Adminduk dengan melibatkan Biro Kerja sama Daerah Pemprov DKI Jakarta untuk memaparkan betapa strategisnya program SIDUKUN 3 in 1 ini dalam rangka Pemanfaatan NIK dan database kependudukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan hanya untuk diterapkan di Jakarta namun juga berharap dapat dilakukan Duplikasi dan replikasi yang sesuai dengan karakter wilayah dan kebutuhan masing masing.



Daftar Pustaka

- Abdulsyani, S. S. (2007). *Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. *Bumi Aksara*.
- Anggito, Albi dan Setiawan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak :Sukabumi.
- Brna, P. (1998, August). Models of collaboration. In *Proceedings of BCS*.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. 2023. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023-2026
- Edward III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Gaus, J. M. (2006). *Reflections on public administration*. University of Alabama Press.
- Giesen, G. (2002). *Creating collaboration: A process that works*. *Greg Giesen & Associates*.
- Grindle, M.S. 1980. *Public Choices and Policy Change: The Political Economy Of Reform In Developing Countries*. London: The Johns Hopkins University Press
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media
- Huang, G. D., Ferguson, R. E., Peduzzi, P. N., & O'Leary, T. J. (2010). Scientific and organizational collaboration in comparative effectiveness research: the VA cooperative studies program model. *The American journal of medicine*, 123(12), e24-e31.
- Jones, A. (2012). *Public Service Quality: A Multidimensional Perspective*. London: Routledge.

- Kurnia, Ridwan. 2020. Tesis Efektivitas Implementasi Kebijakan Tentang *Citizen Relation Management* (CRM) dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jakarta :Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Lai, C. S., Chen, C. S., Chiu, C. J., & Pai, D. C. (2011). The impact of trust on the relationship between inter-organisational collaboration and product innovation performance. *Technology Analysis & Strategic Management*, 23(1), 65-74.
- Lindeke, L. L., & Sieckert, A. M. (2005). Nurse-physician workplace collaboration. *Online J Issues Nurs*, 10(1), 5.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher : Sidoarjo.
- Mazmanian, D.H. & Sabatier, P.A. 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: University Press of America.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moenir. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, J, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mubarok, Syahrul, et, all. 2020. *Policy Implementation Analysis : Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework*. <http://www.jpas.ub.ac.id/index.php/jpas>. *Journal of Public Administration Studies (JPAS)* Vol 5, No.1, pp 33-38, 2020. University of Brawijaya : Malang.
- Prasojo, E. (2014). *Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Purwanto, E., dan Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Sanaghan, P., & Lohndorf, J. (2015). Collaborative leadership: The new leadership stance. *Collaborative Leadership in Higher Education*, 6-37.

Smith, J. (2010). *Understanding Public Service Quality: A Comparative Analysis of the UK and China*. New York: Palgrave Macmillan

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syaifuddin, Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahab, Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Whitford, A. B., Lee, S. Y., Yun, T., & Jung, C. S. (2010). Collaborative behavior and the performance of government agencies. *International Public Management Journal*, 13(4), 321-349.

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 95 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Gubernur No 110 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keputusan Kepala Dinas Dukcapil provinsi DKI Jakarta No.234 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian Terintegrasi dengan Puskesmas Atau Rumah Sakit

Keputusan Kepala Dinas Dukcapil provinsi DKI Jakarta No 16 Tahun 2020 tentang pengembangan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian yang terintegrasi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan praktik mandiri bidan

Instruksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan Pelayanan Kelahiran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan

Surat Edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 11/SE/2021 tentang Kerjasama dalam Pencatatan Kematian Terintegrasi

Surat Edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 8/SE/2021 tentang Kerjasama dalam Pencatatan Kelahiran Terintegrasi

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN 1-1

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KASEKTOR DUKCAPIL KEC. TANAH ABANG DISDUKCAPIL PROVINSI DKI JAKARTA

Mohon Bapak perkenalkan diri dahulu:

Jawab: Saya irpan septian, selaku ka sektor dukcapil Kecamatan Tanah Abang yang melaksanakan program SIDUKUN 3 in 1

1. Apa maksud dan tujuan dari program SIDUKUN 3 in 1? mohon dijelaskan

Jawab: dalam hal ini maksud dan tujuan program SIDUKUN 3 in 1 adalah untuk mempermudah warga dalam mendapatkan akte kelahiran ketika si ibu melahirkan di suatu rumah sakit atau RSUD yang sudah bekerjasama dengan kita. ketika melahirkan ibu tersebut pulang dengan si bayi sudah membawa akta kelahiran berikut dengan BPJS seperti itu.

2. Bagaimana kondisi pelayanan Program SIDUKUN 3 in 1 saat ini?

Jawab: kalau untuk kondisi pelayanan program SIDUKUN 3 in 1 sampai saat ini sudah berjalan dengan baik artinya masyarakat juga sudah mulai mengenal produk tersebut ketika memang sudah mendekati hari kelahirannya, Mereka sudah mempersiapkan dokumen tersebut dan dibawa pada saat melahirkan.

3. Hal apakah yg melatarbelakangi sehingga program SIDUKUN 3 in 1 pada tahap awal implementasi dapat berjalan dengan baik?

Jawab: hal yang melatarbelakangi sehingga program tersebut SIDUKUN 3 in 1 ini, pada saat itu berjalan dengan baik adalah semua stakeholder terutama petugas dukcapil sudah mengetahui dengan baik tata cara dan prosedurnya artinya ketika memang ada warga yang sudah melengkapi dokumen, kita langsung segera proses dan mencetak dokumen layanan tersebut

4. Adakah kendala yg dihadapi dalam tahap implementasi program SIDUKUN 3 in 1 ini? Baik secara tekhnis maupun kebijakan, mohon sebutkan apa saja.

Jawab: kendala yang dihadapi dalam tahap implementasi dalam program SIDUKUN mungkin awal-awal eh secara teknis beberapa stakeholder seperti BPJS dan rumah sakit ini ada yang masih belum memahami tata cara untuk menginput data namun itu berjalan hanya beberapa minggu saja dan mereka sudah bisa mengaplikasikan kebijakan tersebut

- 5. Kebijakan Perubahan SIAK dari terdistribusi menjadi terpusat oleh dirjen dukcapil, apakah memiliki pengaruh terhadap kinerja program SIDUKUN 3 in 1? Mohon di jelaskan.**

Jawab: Terkait perubahan siak terdistribusi menjadi siak terpusat ini sangat mempengaruhi aplikasi SIDUKUN 3 in 1 dikarenakan integrasi data yang biasanya bisa diakses oleh pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak bisa lagi mengakses untuk siak tersebut secara database jadi ada perubahan yang sangat signifikan yaitu untuk ID BPJS kita tidak bisa lagi di create secara langsung atau otomatis seperti itu

- 6. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam menghadapi kendala teknis tersebut?**

Jawab: untuk upaya yang dihadapi dalam menghadapi kendala teknis tersebut kita sering mengadakan rakor baik secara langsung mengundang tenaga operator ataupun pimpinan yang kita undang untuk menjelaskan kebijakan tersebut dan secara teknis teknisnya

- 7. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam menghadapi kendala dalam hal kebijakan lain yang mempengaruhi implementasi program SIDUKUN 3 in 1?**

Jawab:

A. Komunikasi

- 1. Bagaimana komunikasi Dinas sebagai penanggungjawab program dengan para pelaksana dilapangan?**

Jawab: untuk komunikasi dinas sebagai penanggung jawab dengan para pelaksanaan di lapangan ini kita komunikasinya setiap hari kita memberikan laporan Lalu ada feedback dari dinas jika memang eee di monitoring dari dinas setelah ada kendala atau data yang tidak berjalan dengan baik seperti datanya nyangkut atausistemnya tidak baik pasti kita akan komunikasi dua arah dengan dinas,

- 2. Apakah proses penyampaian informasi sudah dilakukan dengan baik? Dengan cara apa?**

Jawab: untuk Proses penyampaian informasi sudah dilakukan dengan baik seperti tadi saya jelaskan bisa dengan cara berkomunikasi baik by Phone atau dengan sistem dan rakor.

- 3. Apakah informasi yang disampaikan kepada para pelaksana sudah tersampaikan dengan jelas?**

Jawab: terutama ini informasi yang saya sampaikan lebih banyak tertuang dalam surat keputusan kadis untuk secara teknisnya Seperti apa dan pelaksanaannya di lapangan seperti apa

B. Sumberdaya

- 1. Staf, apakah selama ini ketersediaan staf operasional program SIDUKUN 3 in 1 sudah mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas?**

Jawab: untuk sumber daya staf ketersediaannya saat ini memang di khususnya di Tanah Abang sudah cukup namun di beberapa tempat kalau saya lihat ada yang masih kekurangan staf tapi kita tidak bicara di lain tempat Ya karena memang lokus tempatnya di Kecamatan Tanah Abang ini sangat baik dari segi staf yang ada di RSUD sudah mendukung.. Staf yang dari Kecamatan juga sudah mendukung jadi tidak masalah dalam staf di Tanah Abang secara kuantitas ataupun kualitas

- 2. Informasi, apakah ada tim khusus yang menangani monev dalam rangka pengumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas layanan?**

Jawab: Untuk tim yang menangani monev dalam rangka pengumpulan informasi yang diperlukan untuk memberikan keputusan dan dalam rangka peningkatan kualitas layanan sudah oke tidak ada masalah

- 3. Kewenangan, apakah selama ini para petugas sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas nya dilapangan? Semacam surat tugas?**

Jawab: kewenangan yang diberikan kepada petugas itu sudah sesuai dengan porsinya Jadi tidak ada tumpang tindih antara petugas satu dan yang lainnya sudah sangat sesuai porsi

- 4. Fasilitas, dalam pelaksanaan program, apakah para pelaksana sudah dibekali dengan fasilitas yang memadai? mohon disebutkan apa saja**

Jawab: Fasilitas memang kita sudah dibekali eee seperti untuk alat cetaknya ada printer laser dan komputer itu sudah sangat memadai

C. Disposisi:

- 1. Menurut anda bagaimana sikap dan komitmen pelaksana terhadap program SIDUKUN 3 in 1 ini? terutama dari aparat birokrasi?**

Jawab: untuk komitmen kita dalam melaksanakan program SIDUKUN 3 in 1 ini kita buat komitmen penuh terhadap layanan masyarakat untuk pencetakan akta kelahiran di RSUD ataupun Puskesmas yang ada rumah bersalinnya dan rumah sakit umum atau rumah sakit swasta yang memang sudah bekerja sama dengan kita kita siap melaksanakan tugas tersebut

D. Struktur Birokrasi:

- 1. Dalam Program SIDUKUN 3 in 1 ini, apakah sudah ada SOP yang terkait dengan aliran pekerjaan atau pelaksanaan program?**

Jawab: untuk SOP sudah ada SOP, dari penentuan untuk tugas kecamatan Seperti apa, RSUD Seperti apa dan BPJS Seperti apa sudah jelas sekali itu di dalam sop sudah tertuang itu.

- 2. Apakah dalam pelaksanaan program SIDUKUN 3 in 1 ini terdapat fragmentasi (tanggung jawab kebijakan dibagi ke beberapa badan sehingga diperlukan koordinasi)?**

Jawab: Untuk pelaksanaan program SIDUKUN 3 in 1 terdapat fragmentasi atau eee kebijakan dibagi beberapa badan sehingga diperlukan koordinasi ya yang tadi sebelumnya saya jelaskan memang ada bagian-bagian atau porsi yang masing-masing dalam Kecamatan Seperti apa dan BPJS seperti apa .contohnya tugas dari RSUD adalah menginput data si bayi yang baru lahir , tugas dari Kecamatan adalah mengeprove sesuai atau tidak adminitrasi yang sudah di-upload atau dilampirkan dalam sistem SIDUKUN 3 in 1 lalu ketika memang sudah eee ter approve dengan baik datanya kita verifikasi lagi untuk kesesuaiannya dan kita masukkan ke dalam sistem ketika memang sudah sesuai itu akan otomatis ter generate akta kelahiran si bayi dan bisa langsung kita cetak dan berikan kepada Puskesmas atau RSUD tersebut lalu dalam proses perjalanan mencetak itu itu bisa nanti BPJS akan terproses juga.

LAMPIRAN 1-2

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KASEKTOR DUKCAPIL KEC. TAMANSARI DISDUKCAPIL PROVINSI DKI JAKARTA

Mohon Bapak perkenalkan diri dahulu:

Jawab: perkenalkan saya Moris Priscahyadi, saya selaku Kasektor Dukcapil Kecamatan Tamansari Jakarta Barat

1. Apa maksud dan tujuan dari program SIDUKUN 3 in 1? mohon dijelaskan

Jawab: Maksud dan tujuan dari si dukun 3 in 1 adalah efisiensi dari layanan selain itu juga peningkatan kualitas layanan yang tadinya tidak ada menjadi ada Seperti contohnya dulu kalau membuat akte lahir di rumah sakit pemohon tidak langsung mendapatkan NIK, KIA KK atau Akta lahir dengan adanya si Dukun itu menjadi satu paket layanan

2. Bagaimana kondisi pelayanan Program SIDUKUN 3 in 1 saat ini?

Jawab: Kondisi layanan SIDUKUN 3 in 1 dulu dan sekarang mengalami banyak perubahan terutama nama dulunya si dukun sekarang simpatik walaupun samapai saat ini para implementor kerap menyebutnya tetap dengan program SIDUKUN 3 in 1, karena sejatinya program itu secara garis besar konsepnya masih sama, namun ada beberapa penyesuaian, Lalu ada beberapa rumah sakit yang dulunya sedikit sekarang banyak dan sistem SIAK sendiri yang tadinya terdistribusi sekarang jadi terintegrasi atau terpusat tentunya penyesuaian Perubahan tersebut membutuhkan adaptasi sistem manajemen orang dalam pengaturan Proses bisnis dan lain-lain

3. Hal apakah yg melatarbelakangi sehingga program SIDUKUN 3 in 1 pada tahap awal implementasi dapat berjalan dengan baik?

Jawab: Yang melatarbelakangi layanan si dukun adalah peningkatan kualitas layanan dinas dukcapil berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mempermudah layanan dan memberikan paket layanan serta berkolaborasi dengan unit terkait stakeholder seperti rumah sakit Puskesmas serta melibatkan peran serta masyarakat jadi paket layanan tersebut masyarakat dapat dipermudah dalam sisi layanan publik administrasi kependudukan dengan program SIDUKUN ini misalnya dengan lahir di rumah sakit atau puskesmas yang sudah bekerjasama dengan dukcapil langsung mendapatkan Nik atau akta lahir Kia serta terupdate administrasi kependudukannya

- 4. Adakah kendala yg dihadapi dalam tahap implementasi program SIDUKUN 3 in 1 ini? Baik secara teknis maupun kebijakan, mohon sebutkan apa saja.**

Jawab: Kendala yang dihadapi dalam implementasi program Si dukun ini adalah pertama secara teknis perlunya Trigger atau connect koneksi gitu ya antara program Rumah Sakit dengan sistem informasi administrasi kependudukan di mana tidak menyambung gitu ya jadi perlu di adakan Trigger untuk di connect-in aplikasinya lalu sumber daya manusia di sisi rumah sakit atau puskesmas tidak menyediakan atau mereka sendiri kekurangan sumber daya untuk menginput atau mengaplikasikan tersebut namun dengan kolaborasi melibatkan penduduk atau pemohon itu dapat berjalan program SIDUKUN 3 in 1 tersebut. Dari sisi kebijakan sudah sedikit demi sedikit terpenuhi seperti MOU atau regulasi antara dinas dukcapil dan Dinas Kesehatan termasuk regulasi dari pusat dari Perpres Permendagri yang mendukung layanan ini bisa berjalan dengan lancar seperti paperless penggunaan kertas HVS A4 80 gram dan TTE (tanda tangan elektronik) sehingga program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien

- 5. Kebijakan Perubahan SIAK dari terdistribusi menjadi terpusat oleh dirjen dukcapil, apakah memiliki pengaruh terhadap kinerja program SIDUKUN 3 in 1? Mohon di jelaskan.**

Jawab: iya sangat berpengaruh sekali, karena NIK yang semestinya menjadi key access, kini sudah tidak bisa lagi, karena sistem yang digunakan oleh masing masing instansi sudah tidak terintegrasi secara sinkron lagi. Ada pembatasan hak akses oleh Dirjen Adminduk, sehingga pengajuan ID BPJS secara terintegrasi dengan SIAK sudah tidak bisa.

- 6. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam menghadapi kendala teknis tersebut?**

Jawab: Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala teknis tersebut adalah selalu berkoordinasi dengan unit-unit terkait dinas dukcapil beserta dengan dinas kesehatan selalu mengadakan rapat koordinasi di setiap service poin untuk mengatasi kendala teknis seperti integrasi antara Siak dan sistem administrasi Rumah Sakit Begitu juga dengan training terhadap sumber daya manusianya dari sisi dukcapil atau dari sisi rumah sakit atau Dinas Kesehatan dan beberapa Inovasi Atau solusi masalah terkait sumber daya manusia adalah melibatkan warga jadi petugas rumah sakit atau Puskesmas bertugas untuk mengarahkan warganya mengisi link dari yang disediakan dari dukcapil lalu mengatur berkas-berkas pendukung untuk kesehatan atau kelahiran lalu petugas untuk capil dari sisi di kantor dukcapil nya mengambil data tersebut untuk dimasukkan ke SIAK lalu dijadikan eee paket layanan lalu caraka mengirimkannya ke Puskesmas atau rumah sakit yang sudah terintegrasi dengan SIDUKUN 3 in 1 atau yang sekarang disebut Simpatik

7. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam menghadapi kendala dalam hal kebijakan lain yang mempengaruhi implementasi program SIDUKUN 3 in 1?

Jawab: .Upaya kebijakan yang dilakukan menghadapi kendala dalam implementasi SIDUKUN ini yaitu tadi yang saya Sebutkan di atas bahwa dinas dukcapil dengan dinas kesehatan selalu mengadakan kolaborasi meeting begitu ya untuk menyamakan persepsi mengutarakan masalah-masalah untuk mencari solusi satu demi satu jadi masalah yang ada diselesaikan dengan cara meeting atau sosialisasi termasuk bila perlu ada kebijakan dari kepala dinas atau dari dari kepaladinas dukcapil atau Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang perlu untuk berjalannya sistem ini karena sistem ini bermanfaat bagi semua dari sisi Rumah Sakit Puskesmas dinas dukcapil bahkan ke pemohon jadi upaya kebijakan yang dilakukan seperti itu

a. Komunikasi

8. Bagaimana komunikasi Dinas sebagai penanggungjawab program dengan para pelaksana dilapangan?

Jawab: Dinas dukcapil selalu mengadakan rapat evaluasi monitoring baik sisi internal atau eksternal yang pertama dari sisi internal mengevaluasi petugas-petugas yang terlibat dalam SI dukun 3in1 dalam hal ini seluruh SKPD Rumah Sakit Puskesmas di seluruh DKI Jakarta yang melayani persalinan baik itu swasta yang sudah bekerja sama sudah di tugaskan termasuk ke sop dan MOU untuk petugas dukcapil memonitoring atau mengevaluasi setiap pelayanan di wilayahnya masing-masing lalu yang kedua mengadakan rapat rutin bersama dengan stakeholder termasuk rumah sakit dan Puskesmas untuk mengetahui kendala atau kesulitan dan mencari solusi bersama lalu dalam sisi MOU dan kesehatan dan dukcapil beserta dengan Rumah Sakit Swasta sudah melakukan MOU atau kota kesepakatan dalam melaksanakan SIDUKUN 3 in 1 ini

9. Apakah proses penyampaian informasi sudah dilakukan dengan baik? Dengan cara apa? Rakor?

Jawab: Sejauh ini proses informasi sudah dilakukan dengan baik dengan cara monitoring dan evaluasi baik internal atau eksternal rapat koordinasi antara pimpinan perusahaan pimpinan Rumah Sakit pimpinan dukcapil beserta dengan staf-staf terkait jadi informasi yang berjalan sudah cukup baik

10. Apakah informasi yang disampaikan kepada para pelaksana sudah tersampaikan dengan jelas?

Jawab: Untuk informasi layanan bagi pelaksana sebenarnya sudah tersampaikan dengan baik hanya kadang kendala-kendala lapangan teknis itu yang menjadi informasi baru bagi dalam hal ini pimpinan tentang implementasinya misalnya kendala sumber daya pada waktu prakteknya untuk menginput di cidukun dan pekerjaan persalinan di bidan atau di puskesmasnya sendiri tersebut sedikit sibuk begitu ya waktu ada pasien yang banyak karena pekerjaan mereka pekerjaan utama Mereka banyak sehingga terkendala dalam penginputan nah itu yang menjadi kendala sebenarnya tapi bisa dikomunikasikan dengan cara melibatkan masyarakat untuk membantu dalam proses penginputan serta pengupload-an berkas pendukung

b. Sumberdaya

11. Staf, apakah selama ini ketersediaan staf operasional program SIDUKUN 3 in 1 sudah mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas?

1. Jawab: Dari sisi dukcapil petugas operasional cukup Karena tidak semua Kecamatan memiliki banyak rumah sakit atau puskesmas yang mengimplementasi dukun sehingga dengan jumlah tersebut masih bisa dihandel dengan jumlah sumber daya Dukcapil sekarang hanya kendalanya adalah di rumah sakitnya kadang mereka terkendala jumlah tetap dari rumah sakit atau puskesmas yang mengurus si dukun 3 in 1 tersebut dalam hal ini mungkin menginput, menginfokan, kepada pemohon dan lain-lain

12. Informasi, apakah ada tim khusus yang menangani monev dalam rangka pengumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas layanan?

Jawab: Dari dinas dukcapil si dukun 3 in 1 telah ditangani oleh tim khusus yaitu bidang pencatatan sipil yang selalu memonitoring dan mengevaluasi layanan SIDUKUN tiap hari-harinya per hari perbulan per tahun jadi Sudah ada tim khusus yang menangani Nah dari penanganan tersebut melakukan monev baik internal maupun eksternal mengumpulkan masalah-masalah mencari solusi dan melakukan upgrading atau peningkatan kualitas layanan sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa meningkatkan kualitas layanan dari SIDUKUN 3 in 1 tersebut

13. Kewenangan, apakah selama ini para petugas sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas nya dilapangan? Semacam surat tugas?

Jawab: Dari sisi kewenangan petugas dukcapil tingkat kecamatan atau sektor Kecamatan sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya seperti menginput di sistem informasi administrasi kependudukan terkait layanan di luar wilayahnya misalnya ada yang melahirkan di luar wilayahnya petugas tersebut diberi akses untuk menginput di luar wilayahnya setingkat dengan level provinsi secara regulasi juga didukung dengan baik hukum seperti SOP, SP yang memberikan kewenangan kepada petugas untuk melaksanakan implementasi si dukun 3 in 1 ini

14. Fasilitas, dalam pelaksanaan program, apakah para pelaksana sudah dibekali dengan fasilitas yang memadai? mohon disebutkan apa saja

Jawab: Dari sisi fasilitas petugas dukcapil sektor di kecamatan yang menangani atau membantu implementasi SIDUKUN 3 in 1 memakai fasilitas yang tersedia seperti yang ada di kecamatan dan di kelurahan dukcapil secara pelaksanaannya mereka masih bisa melaksanakan dengan baik Walaupun memang PC atau komputer termasuk printer dan lain-lain sebenarnya perlu peremajaan karena sudah pengadaan lama dari 2011 dan pengadaan baru pun sepertinya masih lama begitu ya lemot karena ram-nya atau hardisknya yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan spesifikasi sehingga keterlambatan PC tersebut mengganggu dalam proses layanan sebenarnya dari sisi fasilitas catatannya itu

c. Disposisi:

15. Menurut anda bagaimana sikap dan komitmen pelaksana terhadap program SIDUKUN 3 in 1 ini? terutama dari aparatur birokrasi?

Jawab: Menurut saya sikap dan komitmen pelaksana dalam hal ini dinas dukcapil sudah memberikan sikap dan komitmen yang penuh karena memang selain menjadi tupoksinya kemudian juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi Kependudukan kepada seluruh warga Jakarta, lalu yang kedua dari dinas kesehatan mereka juga memiliki komitmen yang tinggi selain memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga Jakarta juga berkolaborasi dan terintegrasi layanan dengan SKPD lain termasuk dalam dukcapil serta dengan dari rumah sakit lain swasta juga Dinas kesehatan memiliki komitmen dan sikap yang baik untuk berkolaborasi bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan terhadap seluruh warga Jakarta jadi dibuktikan dengan MOU atau kesepakatan pemahaman dari masing-masing instansi terikat begitu ya dari masing-masing instansi diikat dengan SOP lalu masing-masing bersama-sama diikat dengan MOU untuk menjadikan layanan ini

komitmen bersama meningkatkan kualitas layanan dan memberikan yang terbaik, Selain itu juga bagi warga Jakarta mendapatkan fasilitas dengan layanan terintegrasi paket layanan juga merupakan jawaban dari banyaknya keluhan atau kesulitan Warga Jakarta dalam layanan administrasi kependudukan dengan adanya si dukun 3 in 1 diharapkan Warga Jakarta dapat memenuhi administrasi kependudukannya mendapatkan hak-hak sipil seperti hak layanan publik hak kesehatan hak pendidikan dari awal sehingga kita juga berpartisipasi dalam menjemput bola layanan tersebut dalam layanan implementasi si dukun 3 in 1 ini

d. Struktur Birokrasi:

16. Dalam Program SIDUKUN 3 in 1 ini, apakah sudah ada SOP yang terkait dengan aliran pekerjaan atau pelaksanaan program?

Jawab: dilihat dari struktur birokrasi program SIDUKUN 3 in 1 sudah ada SOP terkait dengan aliran pekerjaan atau pelaksanaan program tersebut di SOP Tahun 2022 yang sudah ditetapkan sudah termasuk dengan layanan dari sisi dinas kependudukan dan Catatan Sipil

17. Apakah dalam pelaksanaan program SIDUKUN 3 in 1 ini terdapat fragmentasi (tanggung jawab kebijakan dibagi ke beberapa badan sehingga diperlukan koordinasi)?

Jawab: karena dilaksanakan oleh beberapa stakeholder tentunya memiliki fragmentasi seperti kepentingan dukcapil adalah administrasi kependudukan, kepentingan dari Dinas Kesehatan adalah tentang kesehatan atau Rumah Sakit swasta berhubungan dengan kesehatan tapi di sini ada satu titik temu yaitu layanan terintegrasi yaitu Dinas Dukcapil dalam hal ini memberikan administrasi kependudukan bagi warganya yang melahirkan seperti pemberian NIK atau akta lahir, KK, KIA di sisi lain Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit Swasta memberikan layanan kesehatan yang ada hubungannya dengan pemberian administrasi kependudukan atau layanan administrasi seperti pembuatan NIK yang bisa dipakai untuk BPJS dan identitas kependudukan sesuai dengan undang-undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesehatan dan pendidikan dimulai dari pemberian administrasi kependudukan sebagai dasar dari semua layanan

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Operator SIDUKUN 3 in 1 Dukcapil





Wawancara dengan Kasektor Dukcapil

Nomor : 888 /STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 21 Mei 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Jl. Letjen S. Parman No.7, Tomang, Kec. Grogol petamburan
Kota Jakarta Barat 11440

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Fadtheland Mustofa Abdul Ghani Putra Utama
NPM : 1962002011
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Efektifitas Program Sidukun 3 In 1 Dalam Perspektif
Collaborative Governance Pada Dinas Dukcapil Provinsi
DKI Jakarta

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, MA

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan;
4. Mahasiswa Ybs;
5. Petinggal.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat
Telp. 5662400, 5662345, 5662296
JAKARTA

Kode Pos 11440

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 4380 / HM.03.04

Bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Fadtheland Mustofa Abdul Ghani Putra Utama
NIM : 1962002011
Asal Universitas : Politeknik STIA LAN Jakarta
Program Studi / Fakultas : S-2 Administrasi Pembangunan Negara

telah melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan judul tesis "Efektivitas Program Sidukun 3 in 1 dalam Perspektif *Collaborative Governance* pada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001

Tembusan

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Kajur / Sekjur Administrasi Publik
3. Kaprodi / Sekprodi Magister Terapan

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Fadtheland Mustofa Abdul Ghani Putra Utama

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 04 Maret 1980

Alamat : Jl. Rotan, Cahaya I Blok B1 no. 15, Purnama Residence, kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok

Hp : 081290820775

Email : fadtheland.mustofa69@gmail.com

Status : Menikah

Nama Instansi Jakarta : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Jl. S. Parman No. 7 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Jabatan : Kepala Sektor Dukcapil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Kalideres

Pangkat/Golongan : IIIb/ Penata Muda Tk.I

Riwayat Pendidikan :
SDN Cinere 02 Cinere Depok
SMPN 226 Cilandak, Jakarta Selatan
SMU YPK Widuri Cilandak, Jakarta Selatan
Universitas Sam Ratulangi Manado, Administrasi Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta

Riwayat Pekerjaan :
Pengadministrasi pencatatan Sipil Sudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Barat, 2005-2009
Pengadministrasi Subbag TU Sudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009-2010
Kepala Satuan Pelayanan dan Registrasi Kel. Kamal Kec. Kalideres JB, 2010-2011
Kepala Satuan Pelayanan dan Registrasi Kel. Kapuk Kec. Cengkareng JB 2011-2012

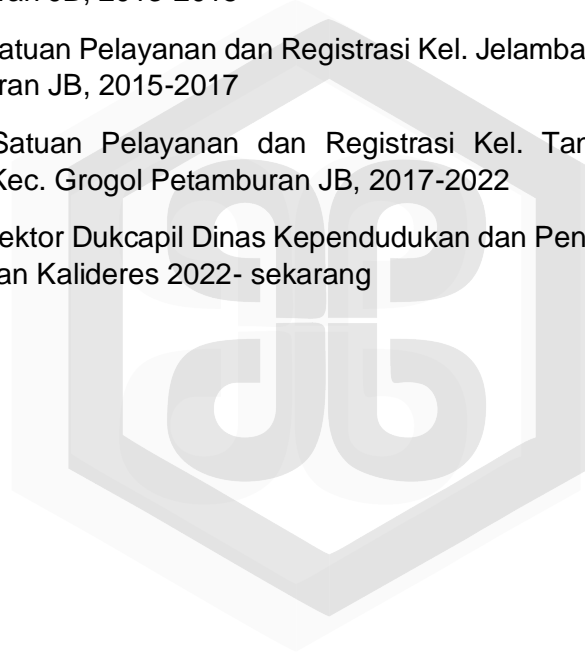
Kepala Satuan Pelayanan dan Registrasi Kel. Kemanggisan Kec.
Palmerah JB, 2012-2013

Kepala Satuan Pelayanan dan Registrasi Kel. Grogol Kec. Rogol
Petamburan JB, 2013-2015

Kepala Satuan Pelayanan dan Registrasi Kel. Jelambar Kec. Rogol
Petamburan JB, 2015-2017

Kepala Satuan Pelayanan dan Registrasi Kel. Tanjung Duren
Selatan Kec. Grogol Petamburan JB, 2017-2022

Kepala Sektor Dukcapil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Kalideres 2022- sekarang



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA